

ABSTRAK

Perubahan Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan besar, termasuk peniadaan sanksi pidana bagi pejabat pemberi izin yang menyalahgunakan kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 165 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah dilakukan penelitian ini, pentingnya perumusan sanksi pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian izin berusaha dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pentingnya perumusan sanksi pidana tersebut untuk mengantisipasi adanya kecerobohan dan membuat pejabat berhati-hati dalam mengeluarkan izin pertambangan dan apabila pejabat pemberi izin berusaha dalam undang-undang minerba melakukan penyalahgunaan kewenangan maka undang-undang minerba yang diterapkan.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Kewenangan, Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRACT

Amendments to Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining bring major changes, including the elimination of criminal sanctions for licensing officials who abuse their authority in the field of mineral and coal mining, this can be seen at in Article 165 of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This research uses a type of normative legal research, namely by using the statutory approach method. Meanwhile, the legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. After carrying out this research, it is important to formulate criminal sanctions against officials who abuse their authority in granting business permits in Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The importance of formulating criminal sanctions is to anticipate carelessness and make officials careful in issuing mining permits and if the official who gives the permit under the mineral and coal law abuses his authority then the mineral and coal law will be applied.

Keywords: *Criminal Sanctions, Abuse of Authority, Mineral and Coal Mining*